

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
BANK PADA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK PATEN SEBAGAI
OBJEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PATEN**

Melyasari
(1587030)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, membuat kehidupan masyarakat pun turut berkembang. Perkembangan perekonomian di suatu negara tidak terlepas dari adanya kegiatan perbankan dan perdagangan. Pada saat ini jaminan fidusia sudah berkembang ke arah yang lebih maju, hak paten kini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Adanya Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten memperkuat bahwa hak paten saat ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penulisan skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi bank dan pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian ini, telah diperoleh hasil: (1) Dalam hal terjadinya wanprestasi baik yang disebabkan oleh debitur lalai dalam membayar hutangnya maupun disebabkan oleh debitur melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian, bank berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut berbentuk hak yang diperoleh bank untuk menempuh upaya penyelamatan terhadap piutangnya dan hak untuk melakukan eksekusi. (2) Pelaksanaan eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dapat dilaksanakan dengan proses pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Akta Notaris tersebut kemudian didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya administratif. Dari hasil pemanfaatan hak ekonomi yang melekat dalam hak paten tersebut, Bank sebagai kreditor dapat mengambil pelunasan piutangnya.

Kata Kunci : Paten, Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Eksekusi

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR BANKS IN
EXECUTION OF PATENT RIGHTS AS OBJECTS OF MATERIAL
GUARANTEE IN CREDIT AGREEMENT BASED ON LAW NUMBER 13
OF 2016 CONCERNING PATENT**

Melyasari
(1587030)

ABSTRACT

Technological developments and economic growth are increasing, making people's lives also develop. Economic development in a country is inseparable from banking and trade activities. At this time fiduciary guarantees have developed in a more advanced direction, patents can now be used as objects of fiduciary. The existence of Article 108 paragraph (1) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents reinforces that current patent rights can be considered as objects of fiduciary guarantee. This thesis discusses the legal protection for banks and the executions of patent rights as objects of fiduciary guarantee in terms of Law Number 13 of 2016 concerning Patents.

The method used in this research is a normative juridical, a focused research to examine the application of the norms. The research is descriptive analytic to describe something with words or sentences, then separated based on their categories to get the conclusion. The research approach includes legislation and conceptual approach. In legal writing this using the technique study of librarianship and use secondary data form primary and secondary legal materials.

Based on this research, the results have been obtained: (1) In the event of default, either due to negligent debtors in paying their debts or due to debtors doing things that are prohibited in the agreement, the bank has the right to obtain legal protection. Such protection takes the form of rights obtained by the bank to make efforts to rescue the receivables and the right to execute. (2) The execution of patent rights as an object of fiduciary in terms from Law Number 13 of 2016 concerning Patents, can be carried out by the process of transfer of patent rights in a written agreement as outlined in the form of a Notary Deed. The Notary Deed is then registered with the Directorate General of Intellectual Property subject to administrative costs. From the results of utilizing the economic rights inherent in these patents, the Bank as a creditor can take payment of its.

Ketwords: Patent, Fiduciary Guarantee, Execution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penelitian	26
BAB II TINJAUAN HUKUM PENGATURAN PATEN DI INDONESIA ..	30
A. Pengaturan Paten Di Indonesia	30
B. Pengertian Paten	34
C. Paten Sebagai Benda Tidak Berwujudl	37
D. Subjek Paten	41

E. Objek Paten	42
F. Jenis-Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungannya	44
G. Persyaratan Perlindungan Hak Paten	46
H. Substansi Hukum Paten Indonesia	51
I. Pendaftaran Hak Paten	56
J. Pengalihan Hak Paten	62
K. Lembaga Penilai Aset Hak Paten	63
L. Valuasi Aset Hak Paten	65

BAB III TINJAUAN HUKUM PENGATURAN PERJANJIAN KREDIT YANG MEMILIKI JAMINAN

A. Perjanjian	68
B. Jenis-Jenis Perjanjian	70
C. Syarat Sahnya Perjanjian	72
D. Perjanjian Kredit Bank	76
E. Bentuk dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank	78
F. Perjanjian Jaminan	81
G. Jaminan Kekayaan Intelektual	83
H. Jaminan Fidusia	86
I. Pengikatan Jaminan Paten	102
J. Penyelesaian Kredit Macet Beragun Kekayaan Intelektual	106

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PADA PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK PATEN

SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN	108
A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kredit	109
B. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Apabila Debitor Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.....	120
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara dengan Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas
Jasa Keuangan

